

LAPORAN PP 39

2023



TRIWULAN I

INSPEKTORAT JENDERAL

KATA PENGANTAR

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2023 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pejabat dan pelaksana di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah saling mendukung dan bekerja keras sehingga tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal dapat terlaksana dengan baik.

Semoga laporan ini bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi perbaikan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Inspektorat Jenderal, dalam mendukung pencapaian sasaran kinerja kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal.

Jakarta, 2023

INSPEKTUR JENDERAL



M. RUM

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal	1
I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program	1
I.3. Struktur Organisasi.....	2
BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	9
A . Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023.....	9
B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2023	13
BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN	17
III.1. Hasil yang Telah Dicapai.....	17
III.2. Analisis Capaian Kinerja.....	20
III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan	34
III.4. Langkah Tindak Lanjut	35
BAB IV. PENUTUP.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal	11
Tabel 2. Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal	13
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023.....	14
Tabel 4. Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2023.....	18
Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 31 Maret 2023	19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal	2
Gambar 2 Bagan Organisasi Inspektorat I	5
Gambar 3 Bagan Organisasi Inspektorat II	6
Gambar 4 Bagan Organisasi Inspektorat III	7
Gambar 5 Bagan Organisasi Inspektorat IV	8

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Tugas dan Fungsi Inspektorat Jenderal

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

I.2. Latar Belakang Kegiatan/Program

Agar fungsi pengawasan Inspektorat Jenderal dapat terselenggara dengan baik, telah disusun program/kegiatan tahun 2023 dengan didasarkan pada arah dan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal ditujukan untuk mendukung kelancaran administrasi dan manajemen pengawasan untuk mewujudkan upaya:

1. Optimalisasi peran pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dengan berbasis pada pembinaan, di mana Inspektorat Jenderal tidak hanya melaksanakan fungsi *Post Audit*, tetapi juga

sebagai *Consulting Partner* (mitra konsultasi) dan sebagai *Quality Assurance* (penjamin mutu) kegiatan unit kerja.

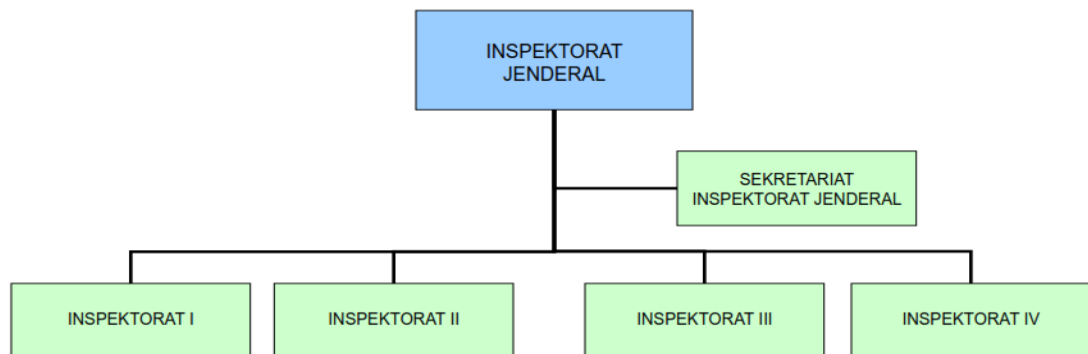
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pengawasan yang cerdas dan profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
3. Penyempurnaan sistem dan prosedur dalam pengawasan dalam upaya mewujudkan ketaatan, ketertiban, efisiensi, efektivitas dan ekonomis dalam pelaksanaan tugas.

I.3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian pasal 169, Organisasi Inspektorat Jenderal terdiri dari:

- Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- Inspektorat I;
- Inspektorat II;
- Inspektorat III; dan
- Inspektorat IV.

Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Bagan Organisasi Inspektorat Jenderal

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

- a) Koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan;
- b) Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengawasan;
- c) koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, penelaahan hukum, perjanjian kerja sama serta pelaksanaan administrasi kerja sama dan hubungan masyarakat di bidang pengawasan;
- d) koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan intern dan pemeriksaan ekstern, pengelolaan, analisis, dan penyusunan laporan hasil pengawasan intern serta evaluasi hasil pengawasan;
- e) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan Inspektorat Jenderal;
- f) pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Inspektorat Jenderal; dan
- g) pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal.

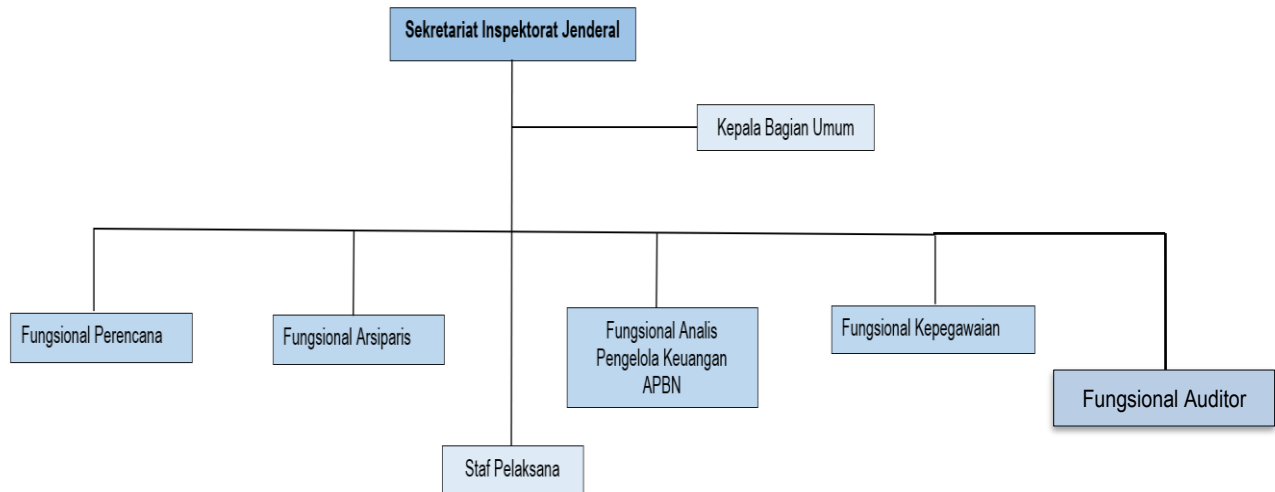
Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas :

- a. Bagian umum; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga

dan perlengkapan, barang milik negara, tata usaha, dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan urusan rumah tangga, barang milik negara, dan tata usaha inspektorat jenderal; dan
- Pelaksanaan urusan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal



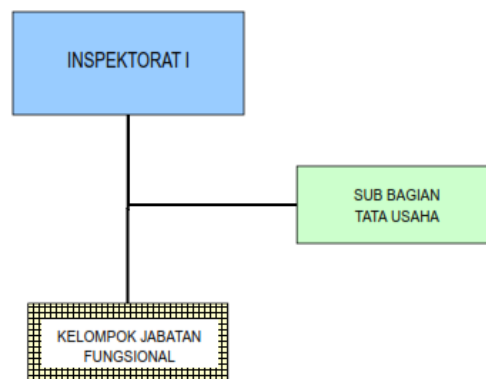
Gambar 2 Bagan Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

1) Inspektorat I

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Sekretariat Jenderal, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri.

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor

- Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok jabatan fungsional auditor terdiri dari sejumlah jabatan fungsional auditor yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional auditor dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior (minimal Auditor Madya) yang ditunjuk oleh Inspektur Jenderal. Jumlah Auditor pada Inspektorat I sebanyak 15 orang, yang terdiri dari:
 - a) Auditor Utama: 1 orang;
 - b) Auditor Madya: 1 orang;
 - c) Auditor Muda: 6 orang;
 - d) Auditor Pratama: 7 orang.
- Bagan Organisasi Inspektorat I adalah sebagai berikut :



Gambar 3 Bagan Organisasi Inspektorat I

2) Inspektorat II

Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat

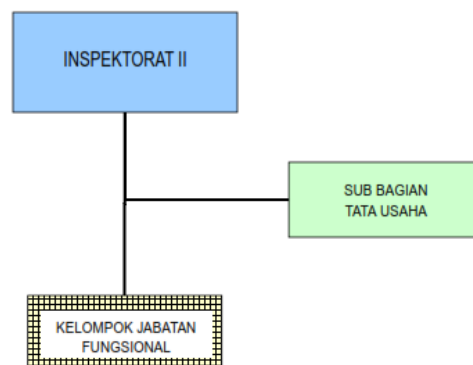
Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka. Inspektorat II terdiri dari :

1. Sub Bagian Program Tata Usaha
 - Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, Program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor
 - Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Pada tahun 2023 ini, Inspektorat II memiliki 18 (delapan belas) orang pegawai yang terdiri dari:

 - a) 1 (satu) orang Inspektur;
 - b) 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
 - c) Auditor: 14 orang;
 - d) Pelaksana: 2 orang.

Bagan organisasi Inspektorat II adalah sebagai berikut :



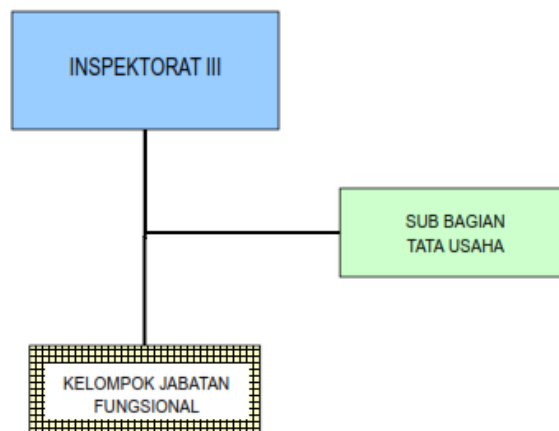
Gambar 4 Bagan Organisasi Inspektorat II

3) Inspektorat III

Inspektorat III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri, Inspektorat Jenderal, Pusat Data dan Informasi dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. Inspektorat III terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;
Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.
2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.
Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat III adalah sebagai berikut :



Gambar 5 Bagan Organisasi Inspektorat III

4) Inspektorat IV

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri serta penyusunan laporan hasil pengawasan Direktorat Jenderal Industri Agro, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil, Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional, Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pusat Industri Halal, dan Perwakilan Kementerian Perindustrian di Luar Negeri.

Inspektorat IV terdiri dari :

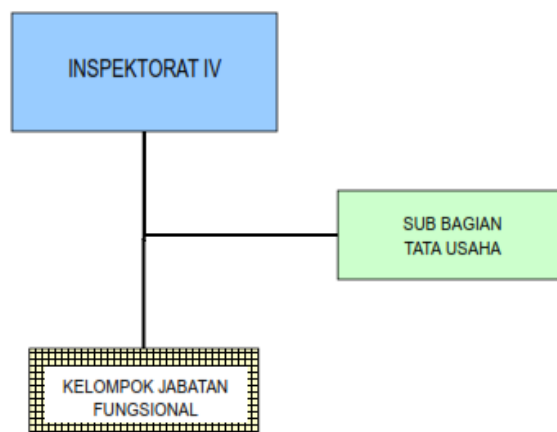
1. Sub Bagian Program dan Tata Usaha;

Sub Bagian Program Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, tata usaha dan rumah tangga Inspektorat.

2. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Kelompok jabatan fungsional auditor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional auditor masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional auditor senior yang ditunjuk oleh Inspektur.

Bagan organisasi Inspektorat IV adalah sebagai berikut :



Gambar 6 Bagan Organisasi Inspektorat IV

BAB II. RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa terdapat dua agenda pembangunan yang melibatkan peran penting industri yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas” dan “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing”. Agenda pemerintah ini dapat dicapai melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan dan akan dilakukan Kementerian Perindustrian yang tertuang pada Renstra Kemenperin 2020-2024, salah satunya adalah kegiatan Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program Pengembangan Industri dan Dukungan Manajemen, Pembinaan, Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”. Inspektorat Jenderal sebagai aparat pengawasan fungsional di lingkungan Kementerian Perindustrian telah menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran pengawasan sebagai berikut:

1. Visi

Visi Inspektorat Jenderal sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian mempunyai visi yang sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, yaitu *“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”*.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Inspektorat Jenderal mengemban misi yang sama dengan Kementerian Perindustrian maupun Presiden dan Wakil Presiden, yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

3. Tujuan

Tujuan dari pelaksanaan pengawasan internal di lingkungan Inspektorat Jenderal selaras dengan tujuan Kementerian Perindustrian, yaitu *“Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional”* yang bercirikan:

- 1) Mampu memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 2) Mampu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian;
- 3) Mampu memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian mengemban tugas untuk melaksanakan “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian”, dengan kegiatan pada Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 1 Program Inspektorat Jenderal

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
1	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat I - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat I - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat I 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Laporan - 5 Laporan - 185 Laporan
2	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat II - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat II - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat II 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Laporan - 5 Laporan - 20 Laporan
3	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat III - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat III - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat III 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Laporan - 5 Laporan - 115 Laporan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TARGET
4	Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	<ul style="list-style-type: none"> - Layanan Perencanaan dan Penganggaran Penyusunan Program Kerja dan Anggaran Inspektorat IV - Layanan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Evaluasi dan Akuntabilitas Inspektorat IV - Layanan Audit Internal dan pada satker cakupan tugas Inspektorat IV 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Dokumen - 5 Dokumen - 30 Laporan
5	Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Perangkat TIK - Layanan Hukum - Layanan Hubungan Masyarakat - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal - Layanan Umum - Layanan Perkantoran - Layanan Sarana Internal - Layanan Manajemen SDM - Layanan Perencanaan dan Penganggaran - Layanan Pemantauan dan Evaluasi - Layanan Manajemen Keuangan - Layanan Audit Internal 	<ul style="list-style-type: none"> - 1 Unit - 2 Layanan - 3 Layanan - 6 Layanan -1 Layanan - 12 Layanan -1 Unit -105 Pegawai - 1 Dokumen -10 Dokumen - 12 Dokumen - 1 Dokumen

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian dapat tercapai targetnya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang selama Tahun 2023 dianggarkan dengan pagu total sebesar Rp43.989.630.000,00.

B. Sasaran Program / Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Adapun Indikator Kinerja Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai ukuran keberhasilan Inspektorat Jenderal adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Indikator Kinerja Tujuan Inspektorat Jenderal

No	Tujuan	Penjelasan Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Penjelasan IKT	Satuan	Target
1	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien untuk Mendukung Peningkatan Peran Industri dalam Perekonomian Nasional	Mendukung tercapainya tujuan Kementerian Perindustrian melalui pengawasan Internal yang efektif dan efisien	Nilai RB area penguatan pengawasan Kementerian Perindustrian	Nilai RB khusus untuk area penguatan pengawasan berdasarkan hasil PMPRB	Persentase	73%
			Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kementerian Perindustrian	Indeks penerapan MRI Kementerian Perindustrian	Indeks	2,89
			Level kapabilitas (IACM) APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian	Terwujudnya level IACM Kementerian Perindustrian melalui <i>self assessment</i> atau penilaian dari BPKP	Nilai	3,05

Dalam mewujudkan tujuan Inspektorat Jenderal, diperlukan upaya-upaya sistematis yang dijabarkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Perspektif Pemangku Kepentingan dan Proses Bisnis Internal yang diukur melalui Indikator Kinerja Sasaran sebagai berikut:

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
STAKEHOLDERS PERSPECTIVE				
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1.1 Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,2 %	Menghitung jumlah temuan BPK atas laporan keuangan kementerian perindustrian yang bernilai uang dengan ketentuan jumlah temuan bernilai uang memiliki jumlah <1,2% total anggaran Kementerian Perindustrian
		1.2 Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan yang ditindaklanjuti	95%	Jumlah total aduan yang telah masuk ke sistem Dumas dan telah didistribusikan ke unit terkait dibagi jumlah total aduan yang telah masuk ke dalam sistem Dumas
		1.3 Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *)IKU	92%	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal yang telah ditindaklanjuti dengan status Sesuai Rekomendasi (SR) maupun Belum Sesuai Rekomendasi (BSR) sesuai dengan rencana aksi yang telah dibuat oleh satker di bagi dengan jumlah total rekomendasi
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2.1 Nilai RB area penguatan pengawasan	73%	Nilai pada area penguatan pengawasan dibandingkan total nilai dalam penilaian Reformasi Birokrasi
		2.2 Indeks penerapan manajemen risiko (MRI) Kementerian Perindustrian *)IKU	2,89	Hasil penilaian Indeks Manajemen Risiko berdasarkan <i>Quality Assurance</i> BPKP terhadap Kementerian Perindustrian
BUSINESS INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE				
3.		3.1 Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi dengan alat bantu kuesioner, Capaian masing-masing Inspektorat diambil berdasarkan nilai unit kerja yang menjadi cakupan

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	3.2 Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3,05	Hasil penilaian Level IACM oleh BPKP terhadap Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	4.1 Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal *)IKU	85%	<p>Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri di Inspektorat Jenderal (RP3DN)=</p> $\frac{RAP3DN}{TOTAP3DN}$ <p>Keterangan: RAP3DN = Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk Dalam Negeri (DN) TotAP3DN = Total pagu anggaran P3DN berdasarkan akun yang telah disepakati yaitu, 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111</p>
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	5.1 Efektivitas Regulasi yang ditetapkan di Lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	<p>Efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal didapatkan dari hasil monev melalui perhitungan yang dilakukan oleh masing-masing unit eselon I dengan melihat dari regulasi yang dijadikan sampel, apakah regulasi tersebut telah sesuai atau dapat mencapai target/tujuan dari regulasi tersebut di susun. Pengukuran efektivitas regulasi yang ditetapkan di lingkungan Kemenperin di hitung secara proporsional, dengan rumus:</p> $Er = \frac{SRe}{Ts}$ <p>Ket: Er = Nilai Efektivitas Regulasi SRe = Jumlah Sampel Regulasi yang tercapai tujuannya Ts = Jumlah Total Regulasi yang dijadikan sampel perhitungan</p> <p>Jumlah penyesuaian pedoman /prosedur pelaksanaan tata kelola pengawasan dengan peraturan perundangan yang berlaku, dihitung dari jumlah program penyusunan yang dibuat</p>

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Cara Pengukuran
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	6.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	Perhitungan nilai SAKIP Inspektorat Jenderal menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 88 tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim Auditor Inspektorat Jenderal
LEARN AND GROWTH PERSPECTIVE				
7.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	7.1 Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	Perhitungan indeks merujuk pada peraturan BKN Nomor 8 tahun 2019 tanggal 15 Mei 2019 tentang pedoman tata cara dan pelaksanaan pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Kategori tingkat Profesionalitas ASN dibuat dalam rentang nilai sebagai berikut: a. 91-100 (sangat tinggi); b. 81-90 (tinggi); c. 71-80 (sedang); 61-70 (Rendah); e. 60 ke bawah (sangat rendah).

Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap triwulan, rencana aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2023 terlampir pada dokumen ini.

BAB III. PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN

III.1. Hasil yang Telah Dicapai

Pada Triwulan I Tahun 2022 Inspektorat Jenderal telah melakukan revisi DIPA sebanyak empat (4) kali dalam rangka mengakomodir kebutuhan kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan Inspektorat Jenderal ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan, namun revisi ini tidak merubah pagu awal sebesar Rp43.989.630.000,00 Kegiatan Inspektorat Jendral pada triwulan I ini mayoritas merupakan kegiatan persiapan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan selanjutnya, persiapan ini telah terlaksana dengan baik. Hingga bulan Maret pegawai telah 100% WFO dengan menurunnya kasus Covid-19, namun efisiensi pelaksanaan kegiatan perkantoran memang sebaiknya perlu dilakukan mengingat kasus Covid-19 di dunia belum berakhir dan pegawai telah terbiasa dengan *flexible working arrangement* pada situasi *new normal* ini.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian pada Triwulan I Tahun 2023 (Januari - Maret) mencapai Rp8.945.563.044,00 atau 20,34% dari total pagu anggaran sebesar Rp43.989.630.000,00.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi hasil evaluasi tahun 2022, upaya untuk meningkatkan capaian IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian yaitu telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung per indikator penilaian, diantaranya pembaruan SOP sesuai proses bisnis saat ini, penyusunan pedoman pengawasan serta peningkatan kompetensi SDM. Tentunya kegiatan *ini dapat terselenggara dengan dukungan anggaran yang memadai*.

Tabel berikut menggambarkan pagu anggaran dan realisasinya sampai dengan TW I tahun 2023 :

Tabel 4. Realisasi Keuangan Inspektorat Jenderal Triwulan I Tahun 2023

	Pagu Anggaran	Realisasi Triwulan I		Jumlah di Blok/Revisi	Outstanding Kontrak	Dana Tersedia	
		Keuangan (Rp.)	%			Jumlah (Rp.)	%
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat I	2.400.000.000	914.966.008	38,12	300,000,000	0	1.185.033.992	49,37
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat II	2.300.000.000	305.401.293	13,28	300,000,000	0	1.694.598.707	73,67
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat III	2.400.000.000	339.419.217	14,14	300,000,000	0	1.760.580.783	73,35
Pengawasan Efektivitas, Efisiensi, dan Akuntabilitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian Perindustrian Cakupan Tugas Inspektorat IV	2.300.000.000	360.213.145	15,66	300,000,000	0	1.639.786.855	71,29
Pengelolaan Manajemen Kesekretariatan Bidang Pengawasan Internal	34.589.630.000	7.025.563.381	20,31	3.208.001.000	383.034.600	23.973.031.019	69,30
TOTAL	43.989.630.000	8.945.563.044	20,34	4.408.001.000	383.034.600	30.253.031.356	68,77

Adapun realisasi anggaran per jenis belanja dilaporkan sebagai berikut:

Tabel 5 Realisasi Anggaran Berdasarkan data SPAN 31 Maret 2023

No	Kode Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%	Outstanding Kontrak	Jumlah Diblok/Direvisi	Dana Tersedia
1	51 Belanja Pegawai	18.600.698.000	3.573.547.126	19,21	0	0	15.027.150.874
2	52 Belanja Barang	22.705.932.000	4.832.615.918	21,28	383.034.600	2.408.001.000	15.082.280.482
3	53 Belanja Modal	2.683.000.000	539.400.000	20,10	0	2.000.000.000	143.600.000
Jumlah		43.989.630.000	8.945.563.044	20,34	383.034.600	4.408.001.000	30.253.031.356
<i>Disclaimer: Realisasi berbasis aktual dan bersifat Bruto</i>							

III.2. Analisis Capaian Kinerja

- 1) Berdasarkan hasil capaian yang diperoleh Inspektorat Jenderal tahun 2022, masih terdapat beberapa indikator kinerja yang perlu di tingkatkan dan di evaluasi strategi pencapaiannya. Maka telah disepakati perubahan target kinerja pada beberapa indikator sesuai dengan Nota Dinas Nomor 225/SJ-IND.1/PR/I/2023, Terdapat perubahan target pada tahun 2023 ini pada indikator:
 - a. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker semula target 2023 yaitu 92,5% menjadi 92%. Hal ini disebabkan oleh satker yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan sesuai dengan targetnya.
 - b. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) yang semula target pada 2023 level 4, menjadi 2,89 karena capaian tahun lalu belum mencapai target maka tahun ini diadakan evaluasi dan strategi baru untuk mencapai target.
 - c. Rata-Rata Indeks Profesionalitas ASN dari semula seharusnya 76 menjadi 71 karena terdapat perubahan indeks pengukuran yang semula bisa melalui survey internal, saat ini harus melalui IPASN, dimana nilai Kemenperin juga masih rendah.

Pada Triwulan I ini mayoritas kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan persiapan dan bersifat koordinasi, hal ini dapat dilihat pada rincian kegiatan yang telah dilaksanakan pada Januari hingga Maret 2023 di lingkungan Inspektorat Jenderal sebagai berikut.

1. Kegiatan Pengawasan dan Pengawasan

- ✓ Mengikuti Rapat Pimpinan terkait Evaluasi PP No. 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian;
- ✓ Sosialisasi Audit Kepatuhan & Audit Kinerja serta persiapan menuju WBK & WBBM satker Medan;
- ✓ Audit Kinerja TA 2022 Bidang Industri KDEI di Taipei;
- ✓ Rapat internal terbatas pembahasan evaluasi IMEI;

- ✓ Rapat Internal terbatas pembahasan mengenai pengusulan satker di lingkungan BSKJI sebagai Lembaga Verifikasi Independen Penghitungan dan Verifikasi Nilai TKDN dan Nilai BMP.

2. Kegiatan Pengawasan

a. Inspektorat I

- 1) Audit Kinerja dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan/BMN pada BPSDMI;
- 2) Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2022 pada Politeknik ATI Makasar, SMK SMAK Makasar, SMK SMTI Makasar, BDI Makasar;
- 3) Mengkoordinir Tim Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2022 pada Satuan Kerja di Makasar;
- 4) Pengawasan Pembangunan Gedung Pendidikan SMK SMAK Bogor;
- 5) Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2022 pada SMK SMTI Bandar Lampung;
- 6) Uji Fisik Audit Pekerjaan Pematangan Lahan SMK SMAK Bogor TA 2022;
- 7) Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2022 pada Politeknik STTT Bandung, AKA Bogor, SMK SMAK Bogor;
- 8) Audit pada BPSDMI lanjutan;
- 9) Koordinasi Program Kerja dan Anggaran pada BPSDMI;
- 10) Audit lanjutan Audit Kinerja dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan/BMN pada BPSDMI;
- 11) Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2022 pada SMK SMAK Makasar, pada SMK SMTI Makasar, BDI Makasar, SMK SMAK Bogor, SMK SMTI Bandar Lampung.

- 12) Uji Fisik Audit Pekerjaan Pematangan Lahan SMK SMAK Bogor TA 2022;
- 13) Reviu LK/BMN Semester II TA 2022 pada BPSDMI dan Sekretaris Jenderal;
- 14) Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2022 pada Politeknik ATI Padang;
- 15) Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2022 pada SMK SMAK Padang dan SMK SMTI Padang;
- 16) Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2022 pada BDI Padang, AKOM ITPT Surakarta, Politeknik ATK Yogyakarta, BDI Yogyakarta, SMK SMTI Yogyakarta;
- 17) Audit lanjutan Audit Kinerja dan Kepatuhan Pengelolaan Keuangan/BMN pada BPSDMI;
- 18) Pembinaan perihal pengawasan dan Pembinaan Komite Sekolah di Pontianak;
- 19) Pembinaan Pengawasan Audit Pada Satuan kerja di Medan;
- 20) Koordinasi Tim Audit pada Satuan Kerja di Yogyakarta;
- 21) Reviu Usulan Revisi DIPA TA 2023 pada Sekretariat Jenderal.
- 22) Audit Kinerja dan Pengelolaan Keuangan/BMN TA 2022 pada Politeknik PTKI Medan, BDI Medan, Politeknik IFPK Kendal, BDI Surabaya, Politeknik Surabaya, Politeknik APP Jakarta, BDI Jakarta;

b. Inspektorat II

- 1) Pembahasan Hasil Pengawasan KUR 2022 dan Rencana 2023;
- 2) Evaluasi Program dan Kegiatan TA 2022 pada Disperindag Jawa Barat;
- 3) Audit Program dan Kegiatan TA 2022 di Satker BBSPJIKKP Jogjakarta (merujuk pada ST Induk nomor 53/IJ-IND/I/2023);

- 4) Reviu PIPK pada Satker Binaan Inspektorat II pada Workshop Penyusunan LK di Bandung, Jawa Barat;
- 5) Rapat koordinasi Inspektur Daerah Seluruh Indonesia.
- 6) Rakor Pengarahan Pengendalian Pengelolaan Kegiatan DIPA Tahun Anggaran 2023;
- 7) Cek Fisik Bantuan Peralatan/Mesin di Lampung;
- 8) Cek Fisik Bantuan Peralatan/Mesin ke Techno Park Semarang dan Disperindag Prov. Jawa Tengah;
- 9) Melaksanakan Pengawasan atas Bantuan Peralatan/Mesin ke Humbang Hasudutan;
- 10)Cek Fisik Bantuan Peralatan/Mesin ke ITS Surabaya, COE Alkes Yogyakarta, dan Bali
- 11)Pengawasan Prototyping Laptop di YPTI Yogyakarta;
- 12)Pengawasan Evaluasi Bimtek Peningkatan SDM Mekanik Bengkel Umum Menjadi Mekanik Bengkel Pelaksana Konversi KBLBB di Sidoarjo (Damarsi Motor dan Bengkel Maghfiroh);
- 13)Pengawasan Evaluasi Bimtek Peningkatan SDM Mekanik Bengkel Umum Menjadi Mekanik Bengkel Pelaksana Konversi KBLBB di Surabaya (Cortese Custom Garage dan Surabaya Motor Klinik);
- 14)Pengawasan Evaluasi Bimtek Peningkatan SDM Mekanik Bengkel Umum Menjadi Mekanik Bengkel Pelaksana Konversi KBLBB di Surabaya (Rangga Classic Motor dan IWS Motorspot);
- 15)Pengawasan Evaluasi Bimtek Peningkatan SDM Mekanik Bengkel Umum Menjadi Mekanik Bengkel Pelaksana Konversi KBLBB di Surabaya (Auto WP dan STP ITS);
- 16)Workshop Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal ILMATE 2023 dalam Rangka Pengawasan Kegiatan Direktorat Jenderal ILMATE TA 2023;

- 17) Membantu Pelaksanaan Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Audit Dana Dekonsentrasi pada Disperindag Provinsi DI Yogyakarta;
- 18) Rapat Koordinasi Persiapan Tender Pengadaan Barang/Jasa di Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA).

c. Inspektorat III

- 1) Asistensi Manajemen Risiko Pada Satker BBSPJIA Bogor;
- 2) Melaksanakan Kunjungan Dalam Rangka Audit Program dan Kegiatan TA 2022 Pada Satker BSPJI Manado (Merujuk pada ST induk nomor 52/IJ-IND/ST/I/2023);
- 3) Melaksanakan Asistensi Manajemen Risiko Pada Satker BBSPJIBBT Bandung, BBSPJIKMN Bandung, Satker BBSPJPPI Semarang, Satker BBSPJIHPMLM Makassar, Satker BBSPJIKFK Jakarta.
- 4) Reviu LK & PIPK BBSPJIKMN, BBSPJILM, BBSPJIBBT, BBSPJIT, BBSPJIS;
- 5) Reviu LK BBSPJIA, BBSPJIKKP, BBSPJIHPMLM, BBSPJIKB, BBSPJIKFK, BBSPJI Padang, BBSPJPPI, BSPJI Manado, BSPJI Ambon, BSPJI Aceh, BSPJI Jakarta, BSPJI Surabaya, BSPJI Banjarbaru, BSPJI Pekanbaru, BSPJI Pontianak, BSPJI Samarinda, BSPJI Medan, BSPJI Palembang, BSPJI Lampung;
- 6) Reviu LK PIPK Pusdatin;
- 7) Reviu LAKIP Inspektorat Jenderal;
- 8) Reviu LKBMN dan PIPK Inspektorat Jenderal & BSKJI Tahun 2022;
- 9) Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Lampung, BBSPJIT Bandung.
- 10) Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Lampung, BBSPJIA Bogor, BBSPJIKFK Jakarta;

- 11) Audit Kinerja Inspektorat Jenderal dan BSPJI Pekanbaru Tahun 2022;
- 12) Reviu Revisi Anggaran Proyek SBSN Pengadaan Fasilitas Fitofarmaka BBSPJIKFK;
- 13) Evaluasi SAKIP BBSPJI Tahun 2022;
- 14) Asistensi Manajemen Risiko BSPJI Medan, Pengawasan BBSPJIA Bogor, Pengawasan BBSPJIKFK Jakarta.

d. Inspektorat IV

- 1) Narasumber Pada Kegiatan Sosialisasi Program dan Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Pusat Industri Hijau Tahun 2023;
- 2) Evaluasi Kinerja Industri Kimia Hulu TA 2022 dan Finalisasi Profil Kerja Industri Kimia Hulu;
- 3) Rapat Persiapan Kick Off Tim Nasional P3DN;
- 4) Reviu Revisi Anggaran Ditjen Industri Agro;
- 5) Membuat Bahan Pimpinan untuk menjadi Narasumber pada Rapat Koordinasi Monev TKDN dengan Dir. IKHF;
- 6) Pembahasan Rencana Joint Audit P3DN dengan BPKP pada tahun 2023;
- 7) Rapat Koordinasi terkait Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi SDM Industri Halal;
- 8) Pengawasan Kegiatan Pemanfaatan Fasilitas PKE Industri Alat Transportasi dan Evaluasi Penetapan OVNI PT Dirgantara Indonesia;
- 9) Webinar "Tips dan Trik menghasilkan Laporan Keuangan 2022 yang andal : Perspektif Kebijakan, Aplikasi dan Pengendalian Internal";
- 10) Menghadiri Undangan Rapat Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Audit Itjen pada Ditjen KPAIL TA 2014-2020;

- 11) Menghadiri Undangan Rapat Kajian Dampak Implementasi Kebijakan Pemberian Fasilitas HGBT dengan RPP tentang Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri;
- 12) Mendampingi Pimpinan Melaksanakan Pembinaan Integritas pada Satuan Kerja Politeknik Industri Furniture dan Pengolahan Kayu Kendal.
- 13) Cek Fisik Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Pengolahan Kayu pada Direktorat IHHP di Demak;
- 14) Cek Fisik Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Pengolahan Kayu pada Direktorat IHHP di Jepara;
- 15) Cek Fisik Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Pengolahan Kayu pada Direktorat IHHP di Cirebon;
- 16) Cek Fisik Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan Industri Pengolahan Kayu pada Direktorat IHHP di Surakarta dan Karanganyar;
- 17) Konsinyering Pemantauan P3DN Proyek GRR Tuban (merujuk pada surat nomor 7/D3.A5/MARVES/II/2023);
- 18) FGD (Focus Group Discussion) Penyusunan Peta Resiko Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Ditjen IKMA) Tahun 2023;
- 19) Pengawalan Forum Evaluasi dan Monitoring Sistem CEIR;
- 20) Cek Fisik dalam rangka Audit Kinerja Ditjen IKFT terkait Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain pada PT. Setia Busana Textile dan PT. Gistex;
- 21) Cek Fisik dalam rangka Audit Kinerja Ditjen IKFT TA 2022 terkait Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Industri Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain pada PT. Indonesia Libolon *Fiber System* dan PT. Win Textile;
- 22) Cek Fisik dalam rangka Audit Kinerja Ditjen IKFT TA 2022 terkait Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan pada Industri

- Penyempurnaan Kain dan Industri Pencetakan Kain pada PT. Leuwijaya Utama Tekstil dan PT. Trisula *Textile Industries*
- 23) Pendampingan Penyusunan Kajian Pemanfaatan ELT (*End of Life Tire*) PT. Sinar Tjokro Energi;
- 24) Koordinasi Pelaksanaan Sekretariat Nasional Hannover Messe 2023 Dalam Rangka Pengawasan Kegiatan Indonesia Partner Country Hannover Messe 2023;
- 25) Sosialisasi Permenperin No 1 Tahun 2023 tentang Pemanfaatan Bahan Baku dengan Tarif Bea Masuk melalui Skema USDFS IK-CEPA;
- 26) Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberdayaan Industri Halal;
- 27) Pengawasan Evaluasi Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) di PT Nippon Shokubai, PT Tifico Fiber Indonesia, Tbk, PT Chang Chun;
- 28) Cek Fisik Efektivitas Bantuan Alat Mesin/Peralatan pada Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar ke 9 Koperasi dan Kelompok Anggota Koperasi Peternakan dan Pemerahan Air Susu Sapi Rakyat SAE Kab. Pujon;
- 29) Pengawasan Persiapan Kegiatan Indonesia Partner Country Hannover Messe 2023;
- 30) Sosialisasi Program Restrukturisasi Mesin/Peralatan TA 2023;
- 31) Cek Fisik Ditjen Industri Agro dalam rangka Pendampingan Industri 4.0 pada PT. Bungasari;
- 32) Cek Fisik Ditjen Industri Agro dalam rangka Pendampingan Industri 4.0 pada Madu Baru;
- 33) Cek Fisik Ditjen Industri Agro dalam rangka Pengadaan Barang Bantuan Mesin Peralatan Produksi Industri *Puree/Konsentrat* Buah di Kab. Bogor.

3. Kegiatan Dukungan Pengawasan

Kegiatan dukungan pengawasan yang dilaksanakan pada bulan Januari – Maret 2023 adalah sebagai berikut:

- a) Program, Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan antara lain telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) Penyusunan Rencana Awal Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Jenderal Tahun 2024 dalam bentuk *Baseline* dan Inisiatif Baru menggunakan Aplikasi Krisna;
 - 2) Penyusunan data dan persiapan Reviu angka dasar Inspektorat Jenderal Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif TA 2024;
 - 3) Bilateral Meeting dengan Bappenas dalam rangka pembahasan Rencana Kerja (Renja) K/L Tahun Anggaran 2024;
 - 4) Revisi DIPA Inspektorat Jenderal TA 2023 ke-2;
 - 5) Mengikuti rapat finalisasi target kinerja Kementerian Perindustrian;
 - 6) Penyusunan Perjanjian Kinerja Eselon I dan II Inspektorat Jenderal;
 - 7) Penyusunan Laporan PP39 Triwulan IV Tahun 2022 Eselon I dan II;
 - 8) Koordinasi penyusunan laporan kinerja Eselon I dan II Inspektorat Jenderal.
- b. Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal dan eksternal:
 - 1) Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut BPK-RI Semester II Tahun 2021. Laporan Telah Disusun Sesuai Dokumen Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang telah ditindaklanjuti;
 - 2) Penyusunan Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal Triwulan IV Tahun 2021;
 - 3) Koordinasi Dengan Auditor Pemeriksa untuk Verifikasi Kesesuaian Dokumen Tindak Lanjut dengan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal (Rutin);
 - 4) Menginventarisir data dan dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan internal dan eksternal;


- 5) Persiapan Data Capaian RB Area Penguatan Pengawasan Tahun 2022;
 - 6) Rapat Pembahasan Rencana Pengawasan 2023 dengan BPKP;
 - 7) Penyusunan Timeline PMPRB Tahun 2023;
 - 8) Penyusunan Konsep SOP TLHP pada Inspektorat Jenderal;
 - 9) Rapat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Ditjen KPAll;
 - 10) Persiapan rekapitulasi data tindak lanjut pada satuan kerja cakupan Inspektorat I, II, III, dan IV;
 - 11) Persiapan bahan paparan pimpinan terkait pelaksanaan anggaran dan optimalisasi PNBPN;
 - 12) Persiapan Format Berita Acara Tindak Lanjut, Surat Pernyataan Kesanggupan Menindaklanjuti, Rencana Aksi Tindak Lanjut, serta Surat Pengantarnya kepada masing-masing Inspektorat;
 - 13) Rapat Pembahasan Mekanisme Rekonsiliasi Data Tindak Lanjut dengan Inspektorat II;
 - 14) Rapat Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada Ditjen Industri Agro.
- c. Telah dilakukan manajemen kepegawaian sebagai berikut:
- 1) Penyampaian Usulan Penempatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Fungsional Auditor Utama Inspektorat Jenderal;
 - 2) Penyampaian Usulan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Jenderal;
 - 3) Koordinasi penyusunan Pakta Integritas Pegawai Inspektorat Jenderal;
 - 4) Rolling Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- d. Penyampaian Laporan PIPK Itjen Tahun 2022;
- e. Pelayanan perbendaharaan dalam rangka proses pengajuan pertanggungjawaban keuangan sampai dengan pencairan









- f. Penelaahan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal:
 - 1) Menetapkan Status Sementara, dan *Inputting* Data Hasil Telaahan kedalam Aplikasi Tindak Lanjut;
 - 2) Koordinasi Dengan Auditor Pemeriksa untuk Verifikasi Kesesuaian Dokumen Tindak Lanjut dengan Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal;
 - 3) Menginventarisasi data dan dokumen tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - 4) Penelaahan Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;
- g. Koordinasi Dalam Rangka Penyampaian Paparan Capaian dan Rencana Aksi Stranas Pencegahan Korupsi;
- h. Mengikuti rapat pembahasan Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) dan Standar Biaya Keluaran Biaya Khusus (SBKK) Kementerian Perindustrian;
- i. Identifikasi kelengkapan data terkait Reviu PAPBJ Inspektorat Jenderal TA 2023;
- j. Revisi DIPA Inspektorat Jenderal ke 4 dalam rangka mengakomodir kebutuhan kegiatan pengawasan dan dukungan pengawasan Inspektorat Jenderal ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- k. Revisi rencana kerja Inspektorat Jenderal Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyesuaian informasi kinerja yang tertuang pada Aplikasi KRISNA dengan Revisi Rencana Strategis Inspektorat Jenderal yang baru;
- l. Finalisasi dan distribusi dokumen Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Jenderal Tahun anggaran 2023 revisi 1;
- m. Penyusunan Rencana Aksi Inspektorat Jenderal Tahun 2023;
- n. *Entry Meeting* Audit Internal Inspektorat Jenderal;
- o. Koordinasi Permintaan Admin SP4N Lapor Unit Eselon I
- p. Koordinasi Penyiapan Data Stranas PK Penguatan Pengendalian Ekspor dan Impor;
- q. Koordinasi Penilaian Risiko Kepatuhan, Kinerja, Korupsi, dan Hambatan Kelancaran Pembangunan atas Pelaksanaan Program P3DN oleh BPKP;









- r. Koordinasi pelaksanaan reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa (PAPBJ);
- s. Sosialisasi Evaluasi ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2023;
- t. Koordinasi kelengkapan dokumen untuk keperluan penilaian penghargaan P3DN;
- u. Pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN 2022 & LHKASN 2022;
- v. Menyusun Draft Keputusan Menteri Perindustrian tentang Pembentukan Tim Penilai Internal Zona Integritas Kementerian Perindustrian;
- w. Menyusun peta risiko Inspektorat Jenderal;
- x. Menyusun laporan kegiatan sosialisasi evaluasi ZI 2023;
- y. Persiapan Pelaksanaan Evaluasi SAKIP tingkat Unit Eselon I;
- z. Tindak Lanjut hasil Reviu KKE PIPK oleh tim Reviu Inspektorat III;
- aa. Reviu dan penyusunan SK Inspektorat Jenderal Tahun 2023;
- bb. Reviu draft Daftar Inventarisasi Masalah atas Perubahan/Penggantian PERMENPERIN Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- cc. Sosialisasi Persamaan Persepsi SAKIP menuru PermenPAN RB No 88 Tahun 2021



Adapun progres capaian dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal pada Triwulan I diinformasikan pada tabel berikut :

Tabel 11. Progres Capaian Renstra Inspektorat Jenderal TW I 2023




No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Keterangan
1.	Terwujudnya Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program Kementerian Perindustrian	1. Batas toleransi temuan material pengawasan eksternal *)IKU	1,2%	Hasil dari koordinasi dan pemutakhiran data penyelesaian temuan hasil pengawasan eksternal Tahun 2022 masih dalam tahap proses penilaian oleh BPK	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Keterangan
		2. Pengaduan masyarakat berkadar pengawasan ditindaklanjuti	95%	Belum ada pelaporan pengaduan dumas, karena laporan dibuat per caturwulan. Laporan akan tersedia pada Bulan April	
		3. Rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti oleh satker *IKU	92%	Rekomendasi hasil pengawasan internal tahun 2022 yang ditindaklanjuti oleh satker sebesar 72,23% dengan total rekomendasi 1253. Tindak Lanjut sesuai rekomendasi sebanyak 824, belum sesuai rekomendasi sebanyak 81 dan belum ditindaklanjuti sebanyak 348	
2.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1. Nilai RB area penguatan pengawasan	73%	Belum dapat dilakukan penilaian karena terdapat perubahan peraturan	
		2. Indeks Penerapan Manajemen Risiko (MRI) Kemenperin *)IKU	2,89	Belum dilaksanakan penilaian maturitas SPIP dan Penjaminan Kualitas MRI Tahun 2023	
3.	Terselenggaranya Pengawasan Internal yang Efektif	1. Tingkat Kepuasan Pelanggan Inspektorat Jenderal	80%	Masih dalam proses pemetaan pelaksanaan	
		2. Capaian IACM Inspektorat Jenderal	3,05	Belum dilaksanakan pemenuhan dokumen dan penilaian IACM	
		3. Penerapan TABK (Teknik Audit Berbasis Komputer)	79%	Masih dalam poses pelaksanaan	
4.	Meningkatnya Pemanfaatan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	1. Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal *)IKU	85%	Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan produk dalam negeri pada Triwulan I. Berikut adalah realisasi PDN dibagi dengan Pagu anggaran 2.856.114.504/	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Keterangan
				8.689.601.000 = 32,87%	
5.	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif	1. Efektivitas Regulasi bidang industri yang ditetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	78%	Belum dilaksanakan Survey Efektivitas regulasi bidang pengawasan yang di tetapkan di lingkungan Inspektorat Jenderal	
6.	Tersusunnya Perencanaan Program, Pengelolaan Keuangan serta Pengendalian yang Berkualitas dan Akuntabel	1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Inspektorat Jenderal	78,6	Pada bulan Mei akan dilakukan Penilaian Dokumen SAKIP Eselon I, saat ini masih dalam tahap persiapan dokumen yang dibutuhkan	
7.	Terwujudnya Sistem Manajemen Pengawasan Internal yang Efektif, dan Efisien	1. Kesesuaian Pelaksanaan Pengawasan Tahuan dengan PKPT	100%	Masih dalam proses pelaksanaan	
		2. Tingkat Kesesuaian Penugasan SDM pengawasan sesuai dengan perannya	100%	Belum dapat diukur, hasil baru akan diperoleh pada Triwulan IV	
		3. Tingkat Dukungan Manajemen Inspektorat Jenderal	74%	Masih dalam proses pelaksanaan	
		4. Nilai Komponen Pengungkit Penerapan RB Itjen	94%	Belum ada penilaian PMPRB karena masih menunggu Surat Edaran yang baru terkait proses penilaiannya	
		5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Inspektorat Jenderal	76	Berdasarkan <i>Online Monitoring</i> , Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Triwulan I Tahun 2023 sebesar 93,14. Nilai IKPA ini bersifat fluktuatif sampai dengan akhir tahun anggaran.	
8.	Terwujudnya APIP yang Profesional dan Berintegritas	1. Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Jenderal	71	Belum dilakukan pengukuran, baru akan diukur pada Triwulan IV.	

No.	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Capaian TW I	Keterangan
		2. <i>Sharing Knowledge</i> atas keikutsertaan diklat substansi pengawasan	70%	Masih dalam proses pelaksanaan	
		3. Persentase APIP yang mendapatkan diklat kompetensi/profesi sesuai rencana kebutuhan diklat	77%	Masih dalam proses pelaksanaan dan belum dapat dihitung. Dapat diketahui hingga Maret ini terdapat diklat: 1) Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang diikuti oleh 4 (empat) orang auditor a.n. Tiurma Juliani Pardede, Jelita Berlina, Abu Naim Toyib, Rayersad Saesar 2) Diklat <i>Certification of Government Accounting Expert (CGAE) level II</i> yang diikuti oleh 1 (satu) orang auditor an Subuh Washardito;	

Keterangan :

-  : Telah tercapai
-  : Dalam proses pelaksanaan
-  : Tidak tercapai

III.3. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Pada Triwulan I Tahun 2023, dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Inspektorat Jenderal belum terdapat hambatan yang berarti, namun pada intranet terkait monev tapkin Inspektorat Jenderal belum dapat dilihat dan diakses, yang menyebabkan kurangnya data dukung pada laporan ini.

III.4. Langkah Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut dari adanya kendala dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan di Triwulan I ini dan bertepatan dengan era *new normal*, maka Inspektorat Jenderal mengupayakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Akselerasi realisasi program/kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal agar terlaksana sesuai dengan perencanaan waktu yang ditetapkan pada awal tahun;
2. Berkoordinasi dengan semua pihak terkait melalui berbagai macam media baik online mauput secara langsung sehingga pelaksanaan kegiatan pengawasan tetap berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang ditetapkan.
3. Masing-masing penanggung jawab kegiatan/koordinator kegiatan agar mengatur perencanaan kegiatan;
4. Koordinator kegiatan agar segera melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan *timeline* yang telah disusun dengan memperhatikan keterkaitan pelaksanaan antar kegiatan.
5. Diperlukan koordinasi antar Tim pada Sekretariat Inspektorat agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar;
6. Dalam rangka meningkatkan capaian nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), maka tim kerja keuangan dan program akan memantau capaian masing-masing indikator secara rutin setiap bulan;

BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian selama periode Triwulan I Tahun 2023 secara umum telah berjalan sesuai dengan program kerja yang telah ditentukan.

Realisasi Anggaran Pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 (Januari-Maret) mencapai Rp 8.945.563.044,00 atau 20,34 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 43.989.630.000,00. Dengan adanya jumlah yang di blok atau di revisi sebesar Rp4.408.001.000,00 dan outstanding kontrak Rp383.034.600,00 maka dana yang tersedia saat ini Rp30.253.031.356,00 Anggaran yang tersedia diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui kegiatan-kegiatan pengawasan dan kegiatan dukungan manajemen pengawasan. Sehingga di akhir tahun 2023, perencanaan yang telah ditetapkan Inspektorat Jenderal dapat tercapai dengan efektif.

Dalam pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja dan keluaran belum dapat dicapai karena pada triwulan ini merupakan tahapan persiapan koordinasi awal, namun pekerjaan rutin yang merupakan kegiatan pengawasan dan pelayanan internal tetap dapat dilaksanakan tanpa adanya kendala yang berarti.

Informasi capaian kinerja Triwulan I ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk evaluasi serta perbaikan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan berikutnya, agar target kinerja yang akan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja TA 2023 dapat tercapai pada akhir tahun anggaran.

LAMPIRAN

Bukti Dukung Capaian Indikator Persentase Nilai Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan barang dan Jasa di Inspektorat Jenderal.

Realisasi Belanja PDN, TKDN, dan Impor terhadap Pagu Anggaran

No.	Unit Kerja	Pagu Anggaran	Realisasi PDN	Realisasi TKDN	Realisasi Impor	% Realisasi PDN + TKDN
1.	Sekretariat Jenderal	153.685.701.000	15.942.034.681	25.000.001	94.125.986	10,39%
2.	Direktorat Jenderal Industri Agro	35.080.865.000	2.856.066.730	0	1.813.214	8,14%
3.	Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil	44.885.028.000	5.345.668.019	0	0	11,91%
4.	Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika	42.218.148.000	4.679.647.853	280.000.000	25.135.608	11,75%
5.	Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka	547.318.782.000	26.354.279.242	4.915.499	773.155.956	4,82%
6.	Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional	149.714.733.000	16.124.985.107	0	504.691.953	10,77%
7.	Inspektorat Jenderal	8.689.601.000	2.856.114.504	0	0	32,87%
8.	Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri	197.876.189.000	23.222.694.899	1.185.690.500	6.876.049.904	12,34%
9.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri	359.900.410.000	24.154.269.506	0	879.081.452	6,71%
	Total	1.539.369.457.000	121.535.760.541	1.495.606.000	9.154.054.073	7,99%

NOTA DINAS
NOMOR B/433/IJ-IND.1/PR/IV/2023

Yth : Inspektur Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Penyampaian Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal Triwulan I
Tahun 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 13 April 2023

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan ini kami lampirkan Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal yang didalamnya berisikan capaian realisasi penyerapan anggaran pada Inspektorat Jenderal pada Triwulan I Tahun 2023 yaitu Rp8.945.563.044,00 atau 20,34% dari total pagu anggaran sebesar Rp43.989.630.000,00.

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada Triwulan I (Januari-Maret) 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan rencana *join audit* dengan P3DN dengan BPKP tahun 2023;
2. Pengawasan kegiatan prioritas satuan kerja termasuk di dalamnya persiapan kegiatan Indonesia sebagai *partner country* Hannover Messe 2023;
3. Audit kinerja TA 2022 Bidang Industri KDEI di Taipei dan Audit kinerja pada satuan kerja cakupan tugas;

4. Asistensi penyusunan Manajemen Risiko satuan kerja;
5. Reviu PIPK, reviu Laporan Keuangan, reviu revisi anggaran;
6. Evaluasi SAKIP UPT dan unit eselon II;
7. Mengikuti rapat persiapan *kick off* tim nasional P3DN;
8. Koordinasi penyiapan data stranas PK penguatan pengendalian ekspor dan impor; serta
9. Kegiatan dukungan manajemen pengawasan lainnya.

Demikian kami sampaikan, apabila Bapak berkenan mohon dapat menandatangani laporan berikut.

Sekretaris Inspektorat Jenderal

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'W' and 'S'.

Wawas Swathatafrijiah

NOTA DINAS
NOMOR B/130/IJ-IND/PR/IV/2023

Yth : Menteri Perindustrian
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Penyampaian Laporan PP 39 Inspektorat Jenderal Triwulan I
Tahun 2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 14 April 2023

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Perindustrian, dengan ini kami laporkan bahwa capaian realisasi penyerapan anggaran pada Inspektorat Jenderal pada Triwulan I Tahun 2023 yaitu Rp8.945.563.044,00 atau 20,34% dari total pagu anggaran sebesar Rp43.989.630.000,00.

Kegiatan yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal pada Triwulan I (Januari-Maret) 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pembahasan rencana *join audit* dengan P3DN dengan BPKP tahun 2023;
2. Pengawasan kegiatan prioritas satuan kerja termasuk di dalamnya persiapan kegiatan Indonesia sebagai *partner country* Hannover Messe 2023;
3. Audit kinerja TA 2022 Bidang Industri KDEI di Taipei dan Audit kinerja pada satuan kerja cakupan tugas;
4. Asistensi penyusunan Manajemen Risiko satuan kerja;
5. Reviu PIPK, reviu Laporan Keuangan, reviu revisi anggaran;

6. Evaluasi SAKIP UPT dan unit eselon II;
7. Mengikuti rapat persiapan *kick off* tim nasional P3DN;
8. Koordinasi penyiapan data stranas PK penguatan pengendalian ekspor dan impor; serta
9. Kegiatan dukungan manajemen pengawasan lainnya.

Demikian kami laporkan, atas perkenan dan arahan Bapak Menteri kami sampaikan terima kasih.

INSPEKTUR JENDERAL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'J' followed by a horizontal line extending to the left and a downward stroke on the right.

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Para Inspektur.

M. RUM